



BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY (NFA)



Laporan Bulanan

JANUARI 2025

Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi
dan Keamanan Pangan



Badan Pangan Nasional

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya sehingga "Laporan Bulan Januari 2025 Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan" dapat diselesaikan.

Laporan ini berisikan program dan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program kegiatan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2025 sebagai bentuk implementasi kegiatan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Kami menyadari laporan ini masih belum sempurna, karena itu saran untuk perbaikan pada periode berikutnya sangat diharapkan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program kegiatan dan semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Jakarta, Februari 2025
Deputi Bidang Penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan



Andriko Noto Susanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<i>I.1 Latar Belakang.....</i>	<i>1</i>
<i>I.2 Tujuan.....</i>	<i>1</i>
<i>I.3 Metodologi Penyusunan Laporan.....</i>	<i>2</i>
BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT.....	3
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
<i>III.1 Realisasi Fisik dan Keuangan.....</i>	<i>5</i>
<i>III.2 Monitoring Kegiatan Prioritas.....</i>	<i>10</i>
BAB IV PENUTUP.....	32
<i>IV.1 Kesimpulan.....</i>	<i>32</i>
<i>IV.2 Permasalahan.....</i>	<i>32</i>
<i>IV.3 Rekomendasi.....</i>	<i>32</i>
LAMPIRAN.....	33
<i>Lampiran 1 Lembar III DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025.....</i>	<i>33</i>
<i>Lampiran 2. Realisasi Keuangan Berdasarkan KRO, Output dan Komponen Posisi Bulan Januari Tahun 2025 Sesuai Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan.....</i>	<i>35</i>

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada tahun 2025, Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu: 1) pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; 2) pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan; 3) pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan 4) dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional. Berdasarkan DIPA awal Nomor SP DIPA-125.01.1.690590/2025 tanggal 2 Desember 2024, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 40.284.839.000,- (Empat Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Hasil pemantauan, evaluasi dan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan Januari Tahun 2025 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan posisi bulan Januari tahun 2025. Laporan ini sebagai catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan selama bulan Januari Tahun 2025 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan bulan Januari tahun 2025 baik fisik maupun keuangan.

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Badan Pangan Nasional pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

I.2 Tujuan

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan posisi bulan Januari Tahun 2025.

2. Mengetahui realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target pada bulan Januari Tahun 2025.

I.3 Metodologi Penyusunan Laporan

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, KRO dan Output dari UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.

BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran program dan indikator kinerja Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan Januari tahun 2025 dilihat dari dukungan pencapaian output/RO dan komponen sebagaimana target sesuai Lembar III DIPA Nomor 125.01.1.690590/2025 tanggal 02 Desember 2024. Pada dokumen tersebut, rencana penarikan pada bulan Januari 2025 ditargetkan sebesar 5,12%. Target tersebut sebagaimana tersaji pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Januari 2025
Deputy Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Januari 2025	
Program, Kegiatan & KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp) 5,12%	Fisik
6877 Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			40.284.839.000 28.391.400.000*		2.062.583.757 1.453.639.680*	
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000 794.580.000*	9 rekomendasi kebijakan	63.680.512 40.682.496*	1 rekomendasi kebijakan
AEA-Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	7.860.000.000 4.468.230.000*	10 kegiatan	402.432.000 228.773.376*	1 Kegiatan
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000 3.315.925.000*	9 kegiatan	236.978.176 169.775.360*	0 Kegiatan
	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000 3.844.062.000*	3 Kegiatan	248.865.280 196.815.974*	0 Kegiatan
AFA-Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	NSPK Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Penyusunan NSPK Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000 382.660.000*	3 NSPK	30.720.000 19.592.192*	1 NSPK
	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000 563.375.000*	5 NSPK	51.200.000 28.844.800*	0 NSPK
	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000 183.712.000*	3 NSPK	15.360.000 9.406.054*	0 NSPK
BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	Pengembangan Usaha Pangan Lokal	2.000.000.000 1.764.450.000*	10 UMKM	102.400.000 90.339.840*	0 UMKM

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Januari 2025	
Program, Kegiatan & KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp) 5,12%	Fisik
PCA-Perizinan Produk	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Sertifikasi dan registrasi	2.500.000.000 1.323.200.000*	500 Produk	128.000.000 67.747.840*	22 Produk
PEH-Promosi	Promosi Pangan B2SA	Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000 3.164.100.000*	1 Kegiatan	179.200.000 162.001.920*	1 Kegiatan
QDB-Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	Operasional pasar pangan segar aman Pusat	904.729.000 464.329.000*	2 Lembaga	46.322.125 23.773.645*	0 Lembaga
	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang Dibina	1.499.760.000 749.880.000*	22 lembaga	76.787.712 38.393.856*	0 Lembaga
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	684.460.000 398.770.000*	1 Kelompok Masyarakat	35.044,352 20,417,024*	0 Kelompok Masyarakat
QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000 1.859.000.000*	1 Laporan	153.497.600 95.180.800*	0 Laporan
QMA-Data dan Informasi Publik	Data Situasi Konsumsi Pangan	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000 910.127.000*	1 Data	76.800.000 46.598,502*	0 Data
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	Fasilitasi Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000 4.205.000.000*	4 Unit	215.296.000 215.296.000*	0 Unit*

Catatan: * : Anggaran setelah dikurangi blokir (berdasarkan aplikasi SAKTI)

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

III.1 Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan tahun anggaran 2025, Nomor DIPA 125.01.1.690590/2025 tanggal 5 Desember 2024, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mendapatkan pagu Anggaran sebesar Rp. 40.284.839.000,-. Pada Bulan Januari 2025, terjadi revisi DIPA berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana efisiensi belanja Badan Pangan Nasional sebesar 60,16%. Sehubungan dengan hal tersebut, anggaran Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang dapat dibelanjakan pada bulan Januari 2025 adalah sebesar Rp. 28.391.400.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Realisasi keuangan pada bulan Januari Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Januari Tahun 2025 per Output dan Komponen Lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Target (5,12%)		Realisasi Bulan Januari 2025		Realisasi SP2D s.d Januari 2025	
Program, Kegiatan & KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
6877 Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			2.062.583.757 1.453.639.680*		51.117.845		51.117.845	
ABR- Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	63.680.512 40.682.496*	1 rekomendasi kebijakan	0	2 rekomendasi kebijakan 1. Rekomendasi kebijakan keamanan dan mutu pangan 2. Kertas Posisi Indonesia utk Draft Standard for Aflatoxin Contamination in Peanuts pada Forum Codex	0	
AEA- Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	402,432,000 228,773,376*	1 Kegiatan	3.727.500	1 Kegiatan	3.727.500	1 Kegiatan
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	236.978.176 169.775.360*	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	248.865.280 196.815.974*	0 Kegiatan	771.000	0 Kegiatan	771.000	0 kegiatan (3 Rapat)

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Target (5,12%)		Realisasi Bulan Januari 2025		Realisasi SP2D s.d Januari 2025	
Program, Kegiatan & KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
AFA-Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Penyusunan NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	30,720,000 19,592,192*	1 NSPK	46.619.345	1 NSPK	46.619.345	1 NSPK
	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	51.200.000 28.844.800*	0 NSPK	0	0 NSPK	0	0 NSPK
	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	15.360.000 9.406.054*	0 NSPK	0	0 NSPK	0	0 NSPK
BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	Pengembangan Usaha Pangan Lokal	102,400,000 90,339,840*	0	0	0	0	0
PCA-Perizinan Produk	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Sertifikasi dan registrasi	128.000.000 67.747.840*	22 Produk	0	199 Produk Izin Edar (1 Rapat)	0	199 Produk Izin Edar (1 Rapat)
PEH-Promosi	Promosi Pangan B2SA	Promosi Pangan B2SA	179,200,000 162,001,920*	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan
QDB-Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	Operasional pasar pangan segar aman Pusat	46.322.125 23.773.645*	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga
	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang Dibina	76.787.712 38.393.856*	0 lembaga	0	0 lembaga	0	Persiapan penilaian OKKPD Provinsi
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi	35,044,352 20,417,024*	1 Kelompok Masyarakat	0	0	0	0

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Target (5,12%)		Realisasi Bulan Januari 2025		Realisasi SP2D s.d Januari 2025	
Program, Kegiatan & KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
Masyarakat	pangan	penganekaragaman pangan						
QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	153.497.600 95.180.800*	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan (1 Kegiatan)
QMA-Data dan Informasi Publik	Data Situasi Konsumsi Pangan	Data Situasi Konsumsi Pangan	76,800,000 46,598,502*	0	0	0	0	0
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	Fasilitasi Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	215.296.000 215.296.000*	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit

Catatan: * : Target realisasi berdasarkan anggaran setelah dikurangi blokir

Tabel 2 di atas menunjukkan realisasi fisik dan keuangan pada output/RO dan komponen lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bulan Januari Tahun 2025. Realisasi anggaran Januari Tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp. 51.117.845,- atau 0,18% berdasarkan anggaran DIPA setelah diblokir atau sebesar 3,52% berdasarkan target realisasi Januari 2025. Realisasi anggaran per direktorat sampai dengan bulan Januari 2025 sebagaimana Tabel 3 berikut. Pada Bulan Januari 2025 sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap perencanaan dan persiapan. Selain itu, anggaran belum dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan terkait dengan adanya wacana pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi belanja Kementerian/Lembaga.

Tabel 3. Realisasi Keuangan Direktorat Lingkup Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Bulan Januari 2025

No	Uraian	PAGU TA 2025 (Rp)		Realisasi Januari 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		DIPA	Revisi	Rp	% DIPA	% Revisi	
HA.6877	Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	40.284.839.000	28.391.400.000	51.117.845	0,13%	0,18%	28.340.282.155
	Direktorat Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	16.144.460.000	11.088.337.000	50.346.845	0,31%	0,45%	11.037.990.155
	Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	8.372.000.000	5.423.760.000	0	0,00%	0,00%	5.423.760.000
	Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	15.768.379.000	11.879.303.000	771.000	0,005%	0,01%	11.878.532.000

Sumber: Data SAKTI Kementerian Keuangan

Tabel 3 di atas menunjukkan realisasi keuangan Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sampai dengan bulan Januari 2025 mencapai 0,13% berdasarkan PAGU Awal atau sebesar 0,18% seberdasarkan PAGU Revisi.

III.2 Monitoring Kegiatan Prioritas

Hasil monitoring kegiatan prioritas lingkup Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan selama bulan Januari Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

III.2.1 Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan

1. Rapat Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional

Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 7 Januari 2025 di Ruang Rapat Nusantara I, Lt. 2, Badan Pangan Nasional. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat lingkup Kedeputusan 3, dan perwakilan dari BGN yaitu Kepala Biro Manajemen Kinerja, Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, Direktur Kerjasama dan Kemitraan. Kegiatan ini bertujuan untuk Sinergitas kegiatan Kedeputusan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan BGN mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, evaluasi program kerja masing-masing direktorat di Bapanas dan BGN serta mengidentifikasi potensi kesamaan dan menghindari *overlap* dalam pelaksanaan program.

Dalam pembahasan, disampaikan bahwa program panganekaragaman konsumsi pangan harus selaras dengan berbagai regulasi yang ada, seperti PP 17/2015 tentang Pengembangan Pangan Berbasis Lokal dan Perpres 81/2024 mengenai Strategi Nasional Percepatan Panganekaragaman Pangan. Selain itu, RPJMN 2025-2029 menggarisbawahi pentingnya integrasi program pangan dengan aspek kesehatan nasional, inovasi ekonomi, dan perlindungan sosial. Evaluasi terhadap program yang telah berjalan menunjukkan adanya beberapa tantangan, diantaranya masih tingginya konsumsi gula, garam, lemak, serta rendahnya konsumsi serat di masyarakat. Selain itu, dominasi konsumsi beras di wilayah Timur Indonesia masih menjadi tantangan dalam upaya diversifikasi pangan.

Salah satu poin utama yang dibahas adalah kolaborasi dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Bappenas. Program ini melibatkan berbagai kementerian/lembaga, dan Bapanas berkomitmen untuk turut serta dalam mendukung implementasinya. Agar pelaksanaan lebih efektif, pengawasan program akan diintegrasikan dalam modul pelatihan dan penyusunan

kebijakan teknis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap desain program Bapanas agar tidak terjadi tumpang tindih dengan inisiatif lain yang serupa. Redesain ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran di awal tahun dan meningkatkan efektivitas program.

Rapat menyimpulkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan program MBG serta peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Semua pihak yang terlibat dalam rantai pelaksanaan program, mulai dari pemasok bahan pangan hingga distribusi ke penerima manfaat, perlu dikolaborasikan secara menyeluruh. Untuk itu, langkah-langkah strategis seperti peningkatan pengawasan, edukasi masyarakat tentang pola makan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta optimalisasi anggaran harus segera dilakukan.



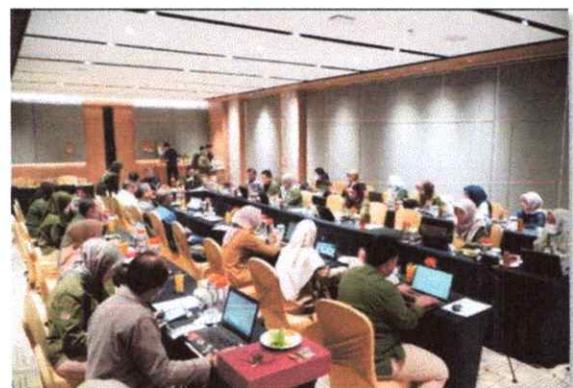
Sebagai tindak lanjut, rapat ini merekomendasikan revisi desain program agar lebih terintegrasi dengan kebijakan nasional dan menghindari duplikasi anggaran. Dengan pendekatan yang lebih sistematis, program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), penurunan prevalensi stunting, serta perbaikan status gizi masyarakat. Dengan demikian, sinergi yang kuat antara Bapanas dan BGN diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan nasional, memperkuat ekonomi berbasis pangan lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024

Rapat Tindak Lanjut Perpres 81/2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2025 di Bogor. Pertemuan dihadiri oleh Plt. Sekretaris Utama, Deputi Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, perwakilan Kementerian Hukum dan Kementerian Dalam Negeri serta Para Pakar.

Menyikapi terbentuknya Kabinet Merah Putih dimana terjadi perubahan nomenklatur K/L serta munculnya beberapa K/L baru seperti Kemenko Bidang Pangan dan Badan Gizi Nasional yang sangat erat kaitannya dengan Perpres tersebut, saran dari Kemensetneg, Kemenkum dan Kemendagri serta forum rapat adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi Perpres 81/2024 tetap dilaksanakan tanpa harus melakukan revisi. Namun demikian ke depan perlu dilakukan penyesuaian target capaian yang tercantum di dalam lampiran Perpres dengan yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029.
- b. Kepala Bapanas disarankan untuk menyampaikan kepada Menko Pangan tentang Perpres 81/2024 untuk selanjutnya dapat dibahas pada Rakortas Kemenko Pangan bahwasanya Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal merupakan salah satu strategi untuk mencapai Swasembada Pangan sebagai Program Prioritas Presiden.
- c. Membentuk tim nasional pelaksanaan Perpres 81/2024 dengan Menko Pangan sebagai Ketua, Kepala Bapanas sebagai Ketua Harian dan beranggotakan Eselon I perwakilan K/L, Organisasi Masyarakat, Akademisi, Pengusaha dan Media (pentahelix).



3. Partisipasi pada Bazar Peringatan Hari Gizi Nasional

Dalam rangka Semarak Hari Gizi Nasional, Direktorat Penganeekaragaman Konsumsi Pangan terus mengkampanyekan pentingnya mengonsumsi Pangan Lokal sebagai bagian dari kampanye B2SA.

Direktorat PKP menghadirkan UMKM Pangan Lokal pada Bazar Pangan Lokal yang dilaksanakan di pelataran Kementerian Kesehatan tanggal 17 Januari 2025. UMKM pangan Lokal yang dihadirkan yaitu Pawon Narasa dengan produk eggroll berbahan pangan lokal seperti singkong, ubi, sorgum, dan talas; dan UMKM Pawon Puteri dengan produk minuman rempah rempah lokal. Bazar Pangan lokal dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih makanan lokal yang bergizi dan mendukung pengembangan ekonomi lokal serta menyediakan/memberikan pengalaman belanja yang edukatif dan inspiratif.



4. Narasumber pada Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Galuh "Strengthening the Role of Agricultural Youth for a Sustainable Future"

Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan hadir sebagai narasumber pada Seminar Nasional bertema "Strengthening the Role of Agricultural Youth for a Sustainable Future". Kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Galuh ini berlangsung di Kabupaten Ciamis pada tanggal 20 Januari 2025 dengan mengusung tema pentingnya peran generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam sektor pertanian.

Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian pangan berbasis potensi lokal. Pemuda adalah motor penggerak perubahan. Dengan ide-ide kreatif dan semangat inovasi, mereka dapat memberikan warna baru dalam sektor pertanian sekaligus memaksimalkan potensi lokal yang dimiliki Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga mengajak mahasiswa untuk memanfaatkan sumber daya lokal secara maksimal guna menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan.

Mahasiswa memiliki kontribusi penting dalam menghidupkan perekonomian petani lokal. Dengan mencintai dan mempromosikan produk pangan lokal, generasi muda tidak hanya mendukung kesejahteraan petani, tetapi juga menjadi tombak utama dalam mewujudkan ketahanan pangan bangsa. Kepedulian generasi muda terhadap pertanian adalah langkah nyata memastikan kedaulatan pangan Indonesia.





Seminar ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Rektor Universitas Galuh, Prof. Dr. Dadi, M.Si, Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis, Slamet Budi Wibowo. Seminar juga diikuti oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Galuh dan perwakilan mahasiswa fakultas pertanian dari berbagai universitas di Jawa Barat. Seminar ini diharapkan mampu memotivasi mahasiswa untuk lebih aktif dalam memanfaatkan potensi pertanian lokal, serta menjadi agen perubahan dalam menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka promosi B2SA, dibagikan merchandise berupa kaos B2SA kepada para mahasiswa.

5. Sosialisasi Kegiatan Rumah Pangan B2SA dan Promosi Pangan B2SA 2025

Sosialisasi kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahun 2025 dilaksanakan secara daring tanggal 21 Januari 2025. Tujuan kegiatan ini adalah mensosialisasikan konsep dan mekanisme pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahun 2025. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan 34 dinas yang menangani urusan pangan tingkat provinsi dan Tim Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

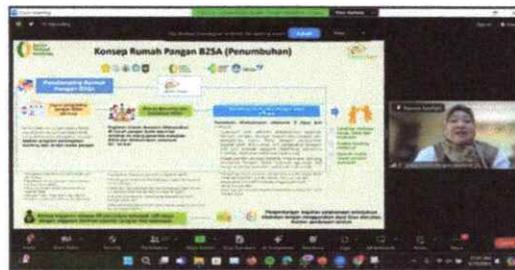
Beberapa hal yang disampaikan yaitu perubahan konsep pengembangan Rumah Pangan dari tahun 2024 dan tahun 2025. Untuk konsep tahun 2024 fokus pada pemberian makanan B2SA sesuai konsep Isi Piringku pada kelompok sasaran stunting yaitu anak stunting, anak gizi kurang, anak gizi buruk, ibu hamil, ibu menyusui, dan calon pengantin. Sedangkan untuk tahun 2025 fokus pada fasilitasi pengolahan pangan dan bimbingan teknis pengolahan pangan berbasis potensi sumber pangan lokal. Adanya perubahan anggaran Rumah Pangan B2SA dari tahun 2024 sebesar Rp 60.000.000 per lokasi, tahun 2025 menjadi Rp 30.000.000 per lokasi.

6. Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA kepada Masyarakat di Desa Bendungan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan Jawa Barat (25 Januari 2025)

Peran generasi muda dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pola konsumsi yang baik dan benar semakin terlihat nyata. Hal ini tercermin dari inisiasi Badan Pangan Nasional bersama santri wati Pesantren Husnul Khotimah pada rangkaian kegiatan PPM (Praktek Pengenalan Masyarakat) dengan menggelar sosialisasi konsumsi pangan B2SA di Balai Desa Bendungan, Kecamatan Lebakwangi, Kuningan Jawa Barat pada tanggal 25 Januari 2025.

Sosialisasi ini melibatkan sekitar 300 warga setempat yang terdiri dari 200 murid Sekolah Dasar, 50 murid Taman Kanak-Kanak, beserta hampir 50 perangkat desa dan pemerintah daerah. Antusiasme ini menunjukkan bahwa semangat generasi muda mampu membawa perubahan positif di tengah masyarakat. Kegiatan ini pun turut mendapat apresiasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Ketua TP PKK Kabupaten Kuningan berharap sosialisasi ini dapat terus digalakkan untuk mendukung peningkatan kualitas gizi warga secara berkelanjutan dengan mendorong kesadaran bersama mengenai pola konsumsi B2SA serta menjadi katalisator perubahan di masyarakat. Kepala Desa Bendungan, juga menegaskan, sosialisasi B2SA tidak hanya bermanfaat untuk mengedukasi masyarakat, namun juga memperkuat hubungan sosial dalam komunitas, karena seluruh warga mulai dari anak-anak, remaja, hingga para orang tua dilibatkan secara aktif dalam kegiatan. Edukasi dilakukan dengan pendekatan menarik melalui sosialisasi dan games interaktif, sehingga pesan yang disampaikan terasa lebih relevan dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.



III.2.2. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

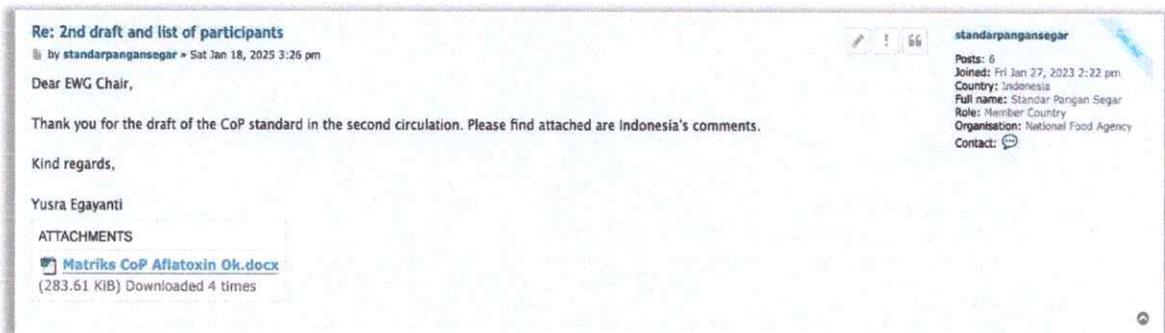
Hasil pemantauan kegiatan prioritas lingkup Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan selama Bulan Januari 2025, kegiatan fisik yang mendukung pencapaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyampaian Kertas Posisi Indonesia pada *electronic Working Group Codex Committee on Contaminants in Foods*

Menindaklanjuti terbitnya sirkulasi tahap 2 pada *electronic Working Group (eWG) Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF)*, Badan Pangan Nasional



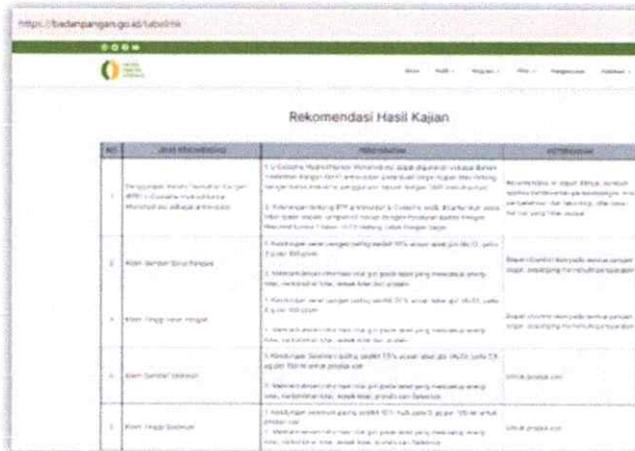
selaku *Alternate MC* telah menyampaikan masukan Indonesia terkait *draft Code of Practices (CoP)*, yaitu *Revised Code of Practice for The Prevention and Reduction of Aflatoxin Contamination in Peanuts (CXC 55-2004)* melalui platform eWG Codex tanggal 18 Januari 2025. Masukan posisi Indonesia terhadap dua *draft Code of Practice (CoP)* telah dikirimkan kepada BPOM selaku Koordinator CCCF pada tanggal 20 Januari 2025.



2. Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Periode Januari 2025

Pada awal tahun 2025 Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan telah mengeluarkan rekomendasi sebanyak 3 rekomendasi keamanan dan mutu pangan, yaitu: permohonan izin penulisan varietas beras, klarifikasi parameter uji produk PSAT kulit jeruk yuzu, dan permohonan rekomendasi parameter uji buah

zuriat. Semua rekomendasi yang dihasilkan dimuat dalam website Badan Pangan Nasional dengan link berikut <https://badanpangan.go.id/tabelrhk>



No	Jenis Rekomendasi	Isi Rekomendasi	Penyusun
1	Rekomendasi terkait 'Tuntutan Kajian' BPN di Cendana terkait dengan 'Masyarakat sebagai Mitra Kajian'	1. Untuk kegiatan 'Peningkatan Kapasitas Mitra Kajian' sebagai mitra Badan Pangan Nasional, BPN akan melakukan kegiatan 'Mitra Kajian' yang melibatkan masyarakat sebagai Mitra Kajian. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan melibatkan mitra kaji yang relevan dengan kegiatan Badan Pangan Nasional. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan melibatkan mitra kaji yang relevan dengan kegiatan Badan Pangan Nasional.	Masyarakat Mitra Kajian sebagai Mitra Kajian yang relevan dengan kegiatan Badan Pangan Nasional.
2	Kajian Berbasis Sains Pangan	1. Melakukan kajian berbasis sains pangan yang relevan dengan kegiatan Badan Pangan Nasional. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan melibatkan mitra kaji yang relevan dengan kegiatan Badan Pangan Nasional.	Badan Pangan Nasional sebagai Mitra Kajian yang relevan dengan kegiatan Badan Pangan Nasional.
3	Kajian 'Ruang' Pasar Pangan	1. Melakukan kajian 'Ruang' Pasar Pangan yang relevan dengan kegiatan Badan Pangan Nasional. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan melibatkan mitra kaji yang relevan dengan kegiatan Badan Pangan Nasional.	Badan Pangan Nasional sebagai Mitra Kajian yang relevan dengan kegiatan Badan Pangan Nasional.
4	Kajian Berbasis Teknologi	1. Melakukan kajian berbasis teknologi yang relevan dengan kegiatan Badan Pangan Nasional. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan melibatkan mitra kaji yang relevan dengan kegiatan Badan Pangan Nasional.	Mitra Kajian sebagai Mitra Kajian yang relevan dengan kegiatan Badan Pangan Nasional.
5	Kajian 'Ruang' Budaya	1. Melakukan kajian 'Ruang' Budaya yang relevan dengan kegiatan Badan Pangan Nasional. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan melibatkan mitra kaji yang relevan dengan kegiatan Badan Pangan Nasional.	Mitra Kajian sebagai Mitra Kajian yang relevan dengan kegiatan Badan Pangan Nasional.



3. Pertemuan dengan *World Food Programme*

Badan Pangan Nasional melaksanakan pertemuan koordinasi dengan *World Food Programme* (WFP) guna merumuskan *Work Plan Table* tahun 2025 untuk menindaklanjuti perjanjian kemitraan dengan WFP tahun 2021-2025. Kerjasama dengan WFP terkait penyusunan standar fortifikasi beras telah dilaksanakan sejak



tahun 2024. Tahun 2024 telah diterbitkan SNI 9314:2024 Kernel Beras Fortifikan yang sudah ditetapkan melalui Surat Kepala BSN No. 641/KEP/BSN/12/2024. SNI tersebut disusun oleh Komite Teknis 67-11 Pangan Segar Tertentu, dengan Badan Pangan Nasional sebagai Sekretariat Komtek. Sebagai tindak lanjut terbitnya SNI 9314:2024, pada tahun 2025 akan disusun SNI beras fortifikasi yang nantinya dapat dijadikan acuan standar mutu, kandungan zat gizi, cara penyimpanan, pelabelan, hingga metode fortifikasi untuk produk beras fortifikasi.

Untuk itu, pada tahun 2025 ini kembali dirumuskan *work plan table* dengan WFP dalam rangka menyukseskan penyusunan standar fortifikasi beras. Adapun ruang lingkup kerjasama antara lain: dukungan WFP dalam dokumen teknis yang dibutuhkan dalam penyusunan standar; penyelenggaraan pertemuan teknis dalam rangka penyusunan standar; sosialisasi standar beras fortifikasi yang telah disusun dan tidak menutup kemungkinan kerjasama dalam kajian penyusunan standar beras fortifikasi.

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah akan dilaksanakan pertemuan untuk penandatanganan *Work Plan Table* NFA-WFP serta pertemuan konsolidasi Komite Teknis 67-11 dalam rangka keberlanjutan penyusunan standar beras fortifikasi.

4. *Sharing Session* Hasil Pelatihan

Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan telah mengirimkan beberapa staf untuk mengikuti Pelatihan yang dilaksanakan oleh BTSF EU dan USDA diantaranya pelatihan tentang *Workshop and Capacity Building for Spices Risk Assessment, BTSF Food Safety Risk Analysis, Market Controls in the sectors of agri-food, wine and spirit drinks, dan USDA Cooperation on Global Pesticide Engagement with AMS*. Staf yang mengikuti pelatihan tersebut, menyampaikan kembali hasil-hasil pelatihan lingkup Direktorat pada acara *sharing session*.



5. Pertemuan Koordinasi Persiapan Pelatihan dengan BTSF

Pertemuan koordinasi dengan *Better Training for Safer Food – European Union* (BTSF EU) dilaksanakan secara daring pada tanggal 22 Januari 2025. Badan Pangan Nasional sebagai *National Contact Point* (NCP) dari BTSF, yaitu program kegiatan yang diinisiasi EU untuk mengorganisir serangkaian pelatihan terkait keamanan pangan, kesehatan tanaman serta kesehatan dan kesejahteraan hewan. Salah satu program kerjasama pelatihan BTSF EU adalah pelatihan *Sustained Training Mission* (STM) *on Composite Products* yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan

Februari dan Maret 2025 di 5 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Vietnam).

Pelatihan ini bertujuan untuk memfasilitasi otoritas kompeten keamanan pangan dan pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang persyaratan keamanan dan mutu, sistem manajemen mutu dan prosedur lainnya terkait importasi *composite products* ke EU, mengingat bahwa Peraturan EU terkait impor *composite products* telah berdampak signifikan terhadap akses pasar bagi pelaku usaha ekspor negara anggota ASEAN.



Pertemuan ini untuk mengkoordinasikan kegiatan pelatihan BTSF STM on *Composite Products* di Indonesia yang akan dilaksanakan pada Bulan Februari 2025. BTSF EU diwakili oleh Maria Quiroga Gili (BTSF Organizer, AENOR) dan dihadiri oleh perwakilan negara Malaysia, Singapura dan Indonesia Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

6. Penyampaian Usulan atas RPP Revisi Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Salah satu amanah dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa pengaturan lebih lanjut terkait label dan iklan pangan diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana dalam pasal 103 dan 107. Untuk itu, guna menjalankan amanah undang-undang tersebut perlu dilakukan revisi PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan disesuaikan dengan UU No. 18 Tahun 2012. Penyusunan RPP tersebut diprakarsai oleh BPOM.

Dalam pasal 108 UU Pangan telah ditetapkan bahwa Badan Pangan Nasional



diberikan amanah untuk melakukan pengawasan terhadap pangan segar termasuk aspek label dan iklan. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pangan Nasional berperan aktif dalam mengawal jalannya pembahasan RPP tersebut dan telah menyampaikan usulan dan masukan terkait Panitia Antar Kementerian dan saran masukan atas RPP tersebut melalui surat Plt. Sestama ke Sestama BPOM No.11/HK.02.02/A/01/2025 tanggal 3 Januari 2025.

7. Rapat Koordinasi Percepatan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dilaksanakan tanggal 13 Januari 2025 di RR Nusantara II secara hybrid. Hal penting yang dibahas adalah Pasal 47 ayat 2 terkait Pengawasan Pangan Olahan dan Pasal 50 terkait koordinator



risk analysis dalam rangka penguatan pengawasan keamanan, mutu, dan gizi pangan. Walaupun tahap harmonisasi telah selesai dilaksanakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum melakukan paraf karena dinilai masih terdapat substansi yang belum selesai, sehingga perlu dilakukan rapat koordinasi teknis.

Percepatan penyelesaian *pending issue* terkait Pasal 47 dan Pasal 50 dalam RPP No 86 Tahun 2019 ini diakomodir oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagaimana surat dari Sekretariat Negara ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk penyelesaian RPP (Surat No. B-562/M/D-1/HK.02.02/ 11/2024, tanggal 4 November 2024), dan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional.



8. Rapat Lanjutan Koordinasi Percepatan Revisi PP No. 86/2019 tentang Keamanan Pangan

Rapat ini merupakan rapat trilateral antara Badan Pangan Nasional dengan BPOM dan Kementerian Pertanian, yang difasilitasi oleh Kemenko Bidang Pangan pada tanggal 30 Januari 2025 dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi percepatan revisi PP No. 86/2019 tentang Keamanan Pangan pada tanggal 13 Januari 2025, yang dilaksanakan secara daring.



Pertemuan ini dipimpin oleh Asdep Keamanan dan Mutu Pangan dan Gizi-Kemenko Pangan dan dihadiri oleh perwakilan dari BPOM, Kementan, dan Bapanas (Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dan Biro OSH). Tujuan pertemuan ini untuk membahas *pending issue* pasal 47 ayat 2b terkait pengawasan pangan olahan asal hewan, dimana belum ada kesepakatan antara BPOM dan Kementan.

Pada pertemuan ini belum didapatkan kesepakatan antara BPOM dan Kementan terkait rumusan penjelasan Pasal 47 ayat 2b. Namun, Bapanas selaku pemrakarsa telah mengusulkan rumusan penjelasan Pasal 47 ayat 2b yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan BPOM dan Kementan. Tindak lanjut rapat ini yaitu mengadakan pertemuan kembali oleh Kemenko Pangan untuk membahas *pending issue* keputusan dari masing-masing Kementerian/Lembaga terkait tersebut.

9. Penetapan PNPS untuk Penyusunan RSNI Beras Fortifikasi

Badan Pangan Nasional telah melakukan penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kernel Beras Fortifikan yang saat ini telah ditetapkan menjadi SNI 9314:2024 Kernel Beras Fortifikan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyusunan SNI yang mengatur lebih lanjut terkait persyaratan pencampuran Kernel Beras Fortifikan pada beras hingga menjadi beras fortifikasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pangan Nasional telah melakukan penyampaian usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) tahun 2025 pada tanggal 9 Oktober 2024 kepada Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui aplikasi SISPK BSN. Usulan PNPS tersebut kemudian ditetapkan menjadi PNPS melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8/KEP/BSN/1/2025 tentang Program Nasional Perumusan Standar Tahun 2025 pada tanggal 3 Januari 2025.



10. Pertemuan Persiapan Rapat Teknis 1 Pembahasan RSNI Beras Fortifikasi

Menindaklanjuti telah ditetapkannya SNI 9314:2024 tentang Kernel Beras Fortifikan dan telah disetujuinya RSNI Beras Fortifikasi dalam PNPS 2025, telah dilaksanakan pertemuan persiapan rapat teknis RSNI Beras Fortifikasi secara daring pada tanggal 31 Januari 2025 secara daring. Sebelumnya Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan telah membentuk Komisi Teknis 67-11 Pangan Segar Tertentu sebagai komite teknis untuk penyusunan SNI terkait standar mutu pangan segar tertentu, yang saat ini ruang lingkup mencakup standar mutu kernel beras fortifikan dan beras fortifikasi. Komtek tersebut terdiri dari perwakilan K/L terkait, pakar/akademisi, lembaga perlindungan konsumen, dan pelaku usaha.

Tujuan pertemuan ini untuk menjaring masukan dari Anggota Komtek sehingga dapat satu persepsi pada saat Rapat Teknis 1 Pembahasan RSNI Beras Fortifikasi. Pertemuan dibuka dan dipimpin oleh Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan serta dihadiri oleh Anggota Komtek 67-11 diantaranya IPB, BRIN, KFI, KKP, BPOM, GAPMMI, BULOG, Food Station, Perpadi, BPKN, Pergizi Pangan dan PATPI serta perwakilan Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional (PSAKKPK BSN).

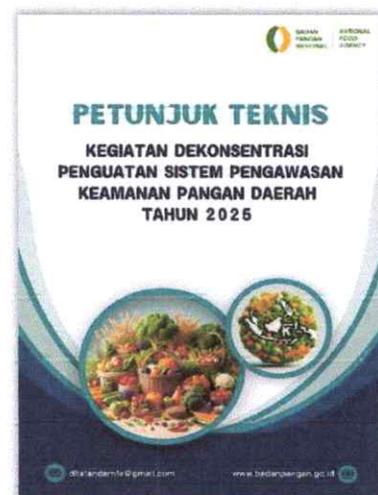
Ruang lingkup persyaratan dalam SNI Beras fortifikasi mencakup persyaratan beras yang akan difortifikasi, persyaratan beras fortifikasi, metode dan rasio pencampuran, cara produksi dan distribusi yang baik (penyimpanan, pengemasan, distribusi, dll), pelabelan, metode pengujian dan lain-lain. Hal lain yang diatur dalam SNI



yaitu bahan (persyaratan Bahan baku dan Bahan Tambahan Pangan); Persyaratan keamanan, Persyaratan mutu beras / beras analog yang akan difortifikasi, Persyaratan mutu beras fortifikasi; Metode pencampuran dan rasio pencampuran; Cara produksi pangan yang baik; Pengemasan dan penyimpanan; Pelabelan; Umur simpan; Pengambilan contoh dan metode uji. Terkait cakupan RSNi Beras Fortifikasi ini difokuskan untuk beras sosoh, sedangkan alternatif penggunaan jenis beras lainnya seperti beras merah, beras pecah kulit, dan beras analog dapat diatur kemudian dalam RSNi tersendiri, mengingat perlunya kajian terkait kandungan zat gizi/ komponen aktif yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama.

11. Penyampaian Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi

Dalam rangka penguatan sistem pengawasan keamanan pangan di daerah, pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional melaksanakan kegiatan untuk penguatan sistem pengawasan keamanan pangan daerah salah satunya melalui pemberian dana dekonsentrasi dalam kegiatan koordinasi, kerjasama, advokasi, sosialisasi, dan KIE di bidang standar keamanan dan mutu pangan daerah di 27 provinsi. Terkait hal tersebut, telah disampaikan Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Penguatan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Daerah Tahun 2025 sebagai panduan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dimaksud kepada provinsi dimaksud pada tanggal 21 Januari 2025.



12. Rapat Persiapan Penilaian Sistem Manajemen Kelembagaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar OKKPD Provinsi Tahun 2025

Rapat Persiapan Penilaian OKKPD Provinsi dilaksanakan di Ruang Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan secara daring pada tanggal 22 Januari 2025. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Urusan Pangan selaku OKKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat serta staf fungsional Direktorat. Rapat



dimaksudkan untuk membahas persiapan penilaian sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar untuk 7 OKKPD Provinsi yang akan dinilai pada tahun 2025. Penilaian pemenuhan Sistem Manajemen

Pengawasan Keamanan Pangan Segar di daerah mempertimbangkan kesiapan, masa berlaku sertifikat, dan sumberdaya lainnya.

Setelah pertemuan ini dilanjutkan dengan koordinasi antara provinsi dengan penanggung jawab (PJ) Pusat dari masing-masing provinsi. Tahapan selanjutnya adalah pengumpulan dokumen data dukung OKKPD yang akan dilakukan penilaian melalui link google drive yang telah disiapkan panitia. Penilaian OKKPD berupa verifikasi dokumen dan tinjauan lapang akan dilakukan pada Bulan Februari atau Maret 2025. Tahapan selanjutnya adalah sidang penilaian untuk penetapan nilai dan diakhiri dengan penerbitan sertifikat. Penyerahan sertifikat kepada provinsi rencananya akan disampaikan pada Rapat Koordinasi Deputi Bulan April atau pada kegiatan peringatan *World Food Safety Day* di Bulan Juni 2025.



13. Mengikuti Pertemuan Sinergitas Kegiatan Deputy Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan Badan Gizi Nasional

Pertemuan Sinergitas Kegiatan Deputy Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) diadakan pada tanggal 7 Januari 2025 di Kantor Bapanas. Kegiatan dibuka oleh Plh. Deputy Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dan dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN; Direktur Kerjasama dan Kemitraan BGN; Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN; Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN; Plt. Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN; serta Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan NFA, Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan NFA; Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan NFA serta perwakilan dari Biro PKH NFA. Pertemuan bertujuan untuk sinkronisasi program kerja Bapanas dan BGN, khususnya melalui Kedeputian Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).



Badan Pangan Nasional menyampaikan program pada Kedeputian 3 yang dapat mendukung kegiatan MBG, antara lain: *B2SA goes to school*, rumah pangan B2SA, skor PPH untuk mengetahui tingkat keragaman konsumsi, standar keamanan dan mutu pangan segar yang dapat diacu dalam mendukung pelaksanaan MBG, pengawasan untuk memastikan sarana MBG menerapkan persyaratan dalam Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik bagi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) dan pembinaan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Tindak lanjut pertemuan ini adalah akan dilaksanakan pertemuan lebih teknis untuk membahas detail kolaborasi program yang dapat dilakukan bersama.

14. Diskusi Pengembangan Sorgum sebagai Sumber Pangan Lokal Potensial

Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan beserta staf menerima kunjungan dari PT. Advanta Seeds Indonesia di Ruang Deputy PKKP pada

tanggal 8 Januari 2025. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Advanta Seeds, Masyarakat Sorgum Indo, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, serta perwakilan Direktorat Penganeekaragaman Konsumsi Pangan, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dan Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

Advanta Seeds Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura yang berinisiatif untuk melakukan pengembangan benih sorgum hibrida di Indonesia dimana sorgum merupakan salah satu pangan pokok lokal Indonesia. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka sinergi pengembangan sorgum sebagai salah satu sumber pangan lokal potensial dalam rangka penguatan ketahanan pangan. Pada kesempatan ini Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan menyampaikan bahwa pengembangan

komoditas sorgum ini sejalan dengan salah satu tuisi NFA yaitu pengembangan dan pematapan penganeekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar. Selain itu, Direktur menjelaskan bahwa Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan memiliki kewenangan dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan segar baik untuk *pre-market* maupun *post-market*.



III.2.3. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Hasil monitoring kegiatan prioritas lingkup Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan selama bulan Januari Tahun 2025 sesuai dengan capaian realisasi keuangan, dilaksanakan melalui kegiatan yaitu:

A. AEA-Koordinasi (Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan)

Kegiatan monitoring prioritas pada program KRO Koordinasi atas Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Rapat Tindak Lanjut Pengawasan HBKN

Pertemuan dibuka oleh Tim Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dan dihadiri oleh perwakilan retail Pangan di Indonesia. Rapat ini bertujuan untuk persamaan persepsi terkait tindak lanjut yang harus dilakukan retail setelah dilaksanakannya pengawasan HBKN.

Berdasarkan hasil pengawasan keamanan pangan segar menjelang HBKN 2024, masih ditemukan retail yang belum memiliki SPPB PSAT dan pangan segar



yang tidak memenuhi persyaratan label sesuai dengan Perbadan No 1/2023 tentang Label Pangan Segar, diantaranya belum memiliki izin edar, tidak ada nama dan alamat produsen, dan pencantuman klaim yang tidak diperbolehkan. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Pengawasan menyampaikan surat kepada retail agar melakukan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian, yang mencakup pemenuhan SPPB PSAT, review

kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan terhadap pemasok dan melakukan sosialisasi kebijakan perusahaan kepada pemasok.

2. Rapat Koordinasi Pengawasan Keamanan Pangan Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Pertemuan dibuka oleh Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dan dihadiri oleh perwakilan Dinas yang menangani urusan pangan tingkat provinsi/kab/kota. Rapat bertujuan untuk melakukan koordinasi awal rencana pengawasan keamanan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan surat Plt. Direktur Tata Kelola BGN Nomor 006/01/05/012025 tanggal 13 Januari 2024 hal Informasi Lokasi Dapur MBG, saat ini program akan dilaksanakan di 109 titik Satuan Pelaksana Perbaikan Gizi (SPPG) di 23 provinsi. Pelaksanaan pengawasan akan dilakukan oleh pengawas keamanan pangan segar di

Badan Pangan Nasional dan dinas yang menangani urusan pangan provinsi/kabupaten/kota selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP).

Pengawasan keamanan pangan berupa pengujian keamanan pangan dilakukan terhadap komoditi pangan segar yang memiliki tingkat risiko keamanan pangan yang tinggi berdasarkan analisa risiko. Pengujian tersebut menggunakan uji cepat rapid test kit. Teknis pelaksanaan pengawasan lebih lanjut akan dijabarkan dalam Manual Pengawasan Keamanan Pangan Segar untuk Mendukung Program MBG. Pasokan bahan pangan untuk Program MBG diharapkan berasal dari: 1) pelaku usaha yang sudah memiliki nomor izin edar/penjaminan keamanan pangan atau pemasok yang sudah memiliki SPPB PSAT; 2) Pasar yang memiliki program keamanan pangan (PAS AMAN, Pasar Sehat, Pasar Aman Berbasis Komunitas); 3) produsen yang diketahui menerapkan praktik budidaya yang baik.



B. PCA-Perizinan Produk (Sertifikat Sarana dan Produk Pangan Segar)

Kegiatan monitoring prioritas pada program KRO Perizinan produk atas Sertifikasi dan registrasi dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penerbitan SPPB PSAT dan Izin Edar PSAT-PL

Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) melalui Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan mendapat amanat untuk melayani penerbitan Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) dan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL). SPPB-PSAT adalah perizinan untuk menjamin penerapan sanitasi higienis pada sarana penanganan pangan segar asal tumbuhan, sedangkan Izin edar PSAT-PL merupakan bentuk penjaminan keamanan produk pangan segar asal importasi yang akan diedarkan dalam wilayah Republik Indonesia. SPPB-PSAT merupakan salah satu persyaratan dasar untuk mendapatkan izin edar PSAT-PL.

Permohonan yang diterbitkan OKPPP selama bulan Januari yaitu 11 SPPB-PSAT dan 188 Izin Edar PSAT-PL sedangkan yang ditolak atau TMS sebanyak 12 Izin Edar PSAT-PL. Saat ini masih terdapat 343 permohonan izin edar PSAT-PL dan 109 permohonan SPPB-PSAT yang sedang berproses.

Dalam menerbitkan SPPB-PSAT, salah satu tahapan yang dilakukan oleh Direktorat PPSKMP sebagai verifikator adalah audit lapang. Audit lapang bertujuan untuk melakukan verifikasi penerapan dengan dokumen yang diajukan pelaku usaha serta melakukan penilaian kesesuaian sanitasi higienis sesuai standar yang berlaku. Pada bulan Januari 2025, OKKPP telah melaksanakan audit lapang terhadap 4 pelaku usaha yang menangani PSAT asal importasi yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang dan Kabupaten Serang.



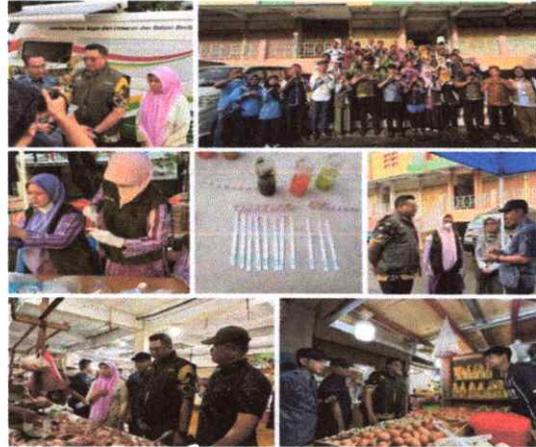
C. QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk (Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan)

Kegiatan monitoring prioritas pada program KRO Pengawasan dan Pengendalian Produk (QIA) atas Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan dan Mutu Pangan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengawasan Keamanan Pangan Segar Terpadu Kota Tangerang

Kegiatan pengawasan Keamanan Pangan Terpadu dilakukan melalui: a) pengambilan sampel pangan segar dan olahan, b) pengujian pangan dengan menggunakan metode uji cepat. Pengambilan sampel dan pengujian sesuai dengan tugas dan fungsi instansi masing-masing. Untuk Bapanas dan Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengambilan sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Selain itu juga dilakukan pemantauan harga pangan.

Pengambilan sampel PSAT diantaranya adalah bawang merah, daun seledri, kentang, tomat, wortel dan labu siam. Hasil uji cepat untuk seluruh sampel PSAT menunjukkan hasil negatif. Kota Tangerang memiliki 20 titik pengujian keamanan pangan di seluruh wilayah kota untuk penjaminan keamanan pangan segar. Titik pengujian ini dilengkapi dengan alat uji cepat keamanan pangan.



BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada periode bulan Januari Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan DIPA awal Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Rp.40.284.839.000.- dimana terdapat blokir sehingga anggaran menjadi Rp.28.391.400.000,-.
2. Realisasi keuangan pada bulan Januari 2025 adalah sebesar Rp. 51.117.845,- atau 0,18% berdasarkan anggaran DIPA setelah diblokir atau sebesar 3,52% berdasarkan target realisasi Januari 2025.

IV.2 Permasalahan

Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, adanya efisiensi anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak optimal.

IV.3 Rekomendasi

Terhadap beberapa kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan ke depan, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan melakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran dan menambah jumlah sumber daya manusia.
2. Menyusun jadwal palang kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
3. Meningkatkan intensitas koordinasi pelaksanaan program dan anggaran lingkup Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar III DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS-0745-2450-7050-5538

Kementerian Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	690590	BADAN PANGAN NASIONAL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	12.476.117	13.228.717	13.258.717	13.258.717	26.382.440	26.382.440	26.482.440	26.492.440	33.392.440	29.992.440	27.115.480	27.256.068	275.718.455
		BELANJA PEGAWAI	3.112.715	3.112.715	3.112.715	3.112.715	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	62.254.305
		BELANJA BARANG	8.911.981	9.657.580	9.684.580	9.684.580	19.234.164	19.234.164	19.247.976	19.257.976	20.210.960	22.757.976	19.881.016	19.968.893	197.731.846
		BELANJA MODAL	451.422	458.422	461.422	461.422	922.845	922.845	1.009.033	1.009.033	6.956.049	1.009.033	1.009.033	1.061.744	15.732.304
	125.01.HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	2.726.169	3.108.769	3.108.769	3.108.769	6.217.539	6.217.539	6.217.539	6.217.539	6.217.539	9.217.539	6.217.539	6.217.539	64.792.789
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.653.819	3.036.419	3.036.419	3.036.419	6.072.839	6.072.839	6.072.839	6.072.839	6.072.839	6.072.839	9.072.839	6.072.839	63.345.789
		53 BELANJA MODAL	72.350	72.350	72.350	72.350	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700	1.447.000
	125.01.HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.898.027	2.248.027	2.248.027	2.248.027	4.496.053	4.496.053	4.596.053	4.596.053	11.496.053	5.096.053	5.096.053	5.062.520	53.577.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.881.777	2.226.777	2.226.777	2.226.777	4.453.553	4.453.553	4.467.969	4.467.969	5.420.349	4.967.369	4.967.369	4.892.979	46.652.000
		53 BELANJA MODAL	16.250	21.250	21.250	21.250	42.500	42.500	128.689	128.689	6.075.704	128.689	128.689	169.541	6.925.000
	125.01.HA.6877	Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	2.064.237	2.064.237	2.064.237	2.064.237	4.003.479	4.003.479	4.003.479	4.003.479	4.003.479	4.003.479	4.003.479	4.003.479	40.284.839
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.850.987	1.850.987	1.850.987	1.850.987	3.576.979	3.576.979	3.576.979	3.576.979	3.576.979	3.576.979	3.576.979	3.577.039	36.019.839
		53 BELANJA MODAL	213.250	213.250	213.250	213.250	426.500	426.500	426.500	426.500	426.500	426.500	426.500	426.500	4.265.000
	125.01.WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	5.787.684	5.807.684	5.837.684	5.837.684	11.665.369	11.665.369	11.665.369	11.675.369	11.675.369	11.675.369	11.798.409	11.972.469	117.063.827
		51 BELANJA PEGAWAI	3.112.715	3.112.715	3.112.715	3.112.715	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	62.254.305

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS 0745-2450-7050-5538

Kementerian Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.525.398	2.543.397	2.570.397	2.570.397	5.130.793	5.130.793	5.130.793	5.140.793	5.140.793	5.140.793	5.263.833	5.426.037	51.714.218
		53 BELANJA MODAL	149.572	151.572	154.572	154.572	309.145	309.145	309.145	309.145	309.145	309.145	309.145	321.002	3.095.304

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pangan Nasional

ttd.
Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T., Ph.D. (h.c.)
NIP. 197411272022211004

Lampiran 2. Realisasi Keuangan Berdasarkan KRO, Output dan Komponen Posisi Bulan Januari Tahun 2025 Sesuai Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan

Program, Kegiatan, KRO, RO		Jumlah Pagu		REALISASI s.d Januari 2025			Sisa Anggaran
		DIPA Awal	REVISI	SP2D	% DIPA	% Revisi	
HA.6877 Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		40.284.839.000	28.391.400.000	51.117.845	0,13%	0,18%	28.340.282.155
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.243.760.000	794.580.000	0	0,00%	0,00%	794.580.000
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000	794.580.000	0	0,00%	0,00%	794.580.000
AEA	Koordinasi	17.349.130.000	11.628.217.000	4.498.500	0,03%	0,04%	11.623.718.500
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	7.860.000.000	4.468.230.000	3.727.500	0,05%	0,08%	4.464.502.500
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000	3.315.925.000	0	0,00%	0,00%	3.315.925.000
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000	3.844.062.000	771.000	0,02%	0,02%	3.843.291.000
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.900.000.000	1.129.747.000	46.619.345	2,45%	4,13%	1.083.127.655
AFA.001	NSPK Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000	382.660.000	46.619.345	7,77%	12,18%	336.040.655

Program, Kegiatan, KRO, RO			Jumlah Pagu		REALISASI s.d Januari 2025			Sisa Anggaran
			DIPA Awal	REVISI	SP2D	% DIPA	% Revisi	
AFA.002		NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000	563.375.000	0	0,00%	0,00%	563.375.000
AFA.003		NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000	183.712.000	0	0,00%	0,00%	183.712.000
BDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2.000.000.000	1.764.450.000	0	0,00%	0,00%	1.764.450.000
BDG.001		UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	2.000.000.000	1.764.450.000	0	0,00%	0,00%	1.764.450.000
PCA		Perizinan Produk	2.500.000.000	1.323.200.000	0	0,00%	0,00%	1.323.200.000
PCA.001		Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.500.000.000	1.323.200.000	0	0,00%	0,00%	1.323.200.000
PEH		Promosi	3.500.000.000	3.164.100.000	0	0,00%	0,00%	3.164.100.000
PEH.001		Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000	3.164.100.000	0	0,00%	0,00%	3.164.100.000
QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.404.489.000	1.214.209.000	0	0,00%	0,00%	1.214.209.000
QDB.001		Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.000	464.329.000	0	0,00%	0,00%	464.329.000
QDB.002		Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	1.499.760.000	749.880.000	0	0,00%	0,00%	749.880.000
QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	684.460.000	398.770.000	0	0,00%	0,00%	398.770.000

Program, Kegiatan, KRO, RO			Jumlah Pagu		REALISASI s.d Januari 2025			Sisa Anggaran
			DIPA Awal	REVISI	SP2D	% DIPA	% Revisi	
QDD.001		Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	684.460.000	398.770.000	0	0,00%	0,00%	398.770.000
QIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.998.000.000	1.859.000.000	0	0,00%	0,00%	1.859.000.000
QIA.002		Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000	1.859.000.000	0	0,00%	0,00%	1.859.000.000
QMA		Data dan Informasi Publik	1.500.000.000	910.127.000	0	0,00%	0,00%	910.127.000
QMA.001		Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000	910.127.000	0	0,00%	0,00%	910.127.000
RAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.205.000.000	4.205.000.000	0	0,00%	0,00%	4.205.000.000
RAG.001		Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000	4.205.000.000	0	0,00%	0,00%	4.205.000.000